

LAPORAN KINERJA

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TRIWULAN II
TAHUN 2020**

**STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN BELAWAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kata Pengantar

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan II Tahun 2020 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Triwulan II Tahun 2020 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2020 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan (UPT Stasiun PSDKP Belawan)

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2020. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Stasiun PSDKP Belawan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Belawan, 13 Juli 2020

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan



Andri Fahrulsyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19780901 200212 1 002

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan telah diintegrasikan dengan *Balanced Scorecard* (BSC). Penyusunan Lkj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan UPT Stasiun PSDKP Belawan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Belawan menggunakan 3 (tiga) perspektif dalam BSC, yaitu: *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Dalam penggunaannya, Stasiun PSDKP Belawan hanya menggunakan 3 (tiga) perspektif BSC yaitu *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective* sedangkan untuk *Stakeholders Perspective* dikarenakan Stasiun PSDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai unit kerja pendukung yang mengacu pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai unit kerja utama.

Sebagai implikasi penerapan BSC dalam upaya perencanaan Tahun 2020, Sasaran Kegiatan UPT Stasiun PSDKP Belawan bermuara pada 8 Sasaran Kegiatan (SK), yaitu: ⁽¹⁾Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis; ⁽²⁾Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan; ⁽³⁾ Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya Pemantauan SDKP; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan

SDKP;⁽⁶⁾Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP;⁽⁷⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan dan ⁽⁸⁾ Tata kelola pemerintahan yang baik.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Kegiatan, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2020, sebagai hasil dari implementasi BSC, terdapat 29 IKU pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan . Jumlah IKU ini mengalami revisi pada Triwulan II dari yang sebelumnya 30 IKU pada Triwulan I menjadi 29 IKU pada Triwulan II. Pencapaian IKU Triwulan II Tahun 2020, dari 28 IKU level UPT Stasiun PSDKP Belawan terdapat 10 (sepuluh) IKU berstatus Putih (tidak ada skor), IKU berwarna kuning tidak ada, IKU berwarna merah tidak ada, serta 18 (delapan belas) IKU berwarna hijau (terealisasi 100%).

Realisasi anggaran tahun 2020 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai 30 Juni 2020 sebesar **33,55%** atau sebesar **Rp 15.358.282.343,-** (*Lima Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) dari total anggaran yang di alokasikan yaitu **Rp. 45.777.424.000,-** (*Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*). Anggaran Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan II mengalami revisi anggaran dari **Rp. 76.652.522.000,-** (*Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*) menjadi **Rp. 45.777.424.000,-** (*Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*). Revisi anggaran ini di lakukan karena adanya pandemi Covid – 19 yang di alami Indonesia bahkan dunia sehingga anggaran tersebut di alihkan untuk penanganan virus Covid – 19 tersebut. Melalui Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan Tahun 2020.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Data Umum Organisasi.....	2
D. Isu Aktual.....	5
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024	6
B. Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024	6
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	9
D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2020	14
1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2020	14
B. Analisis Pencapaian Kinerja.....	17
1. Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat.....	17
2. Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.....	18
3. Sasaran Kegiatan 3 : Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.....	23
4. Sasaran Kegiatan 4 : Terselenggaranya Pemantauan Sumber Daya Perikanan.....	28
5. Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	30
6. Sasaran Kegiatan 6 : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP.....	33

7. Sasaran Kegiatan 7 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan.....	38
8. Sasaran Kegiatan 8 : Tata kelola pemerintahan yang baik.....	40
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	47
LAMPIRAN	49

Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2020	10
Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2020	14
Tabel 3. Hasil Pengukuran Sub IKU Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	19
Tabel 4. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	24
Tabel 5. Tahapan pemeriksaan kapal perikanan dikatakan taat.....	25
Tabel 6. Tahapan pemeriksaan unit usaha pengolahan hasil perikanan dikatakan taat ..	26
Tabel 7. Tahapan pemeriksaan unit usaha distribusi hasil perikanan dikatakan taat.....	27
Tabel 8. Tahapan pemeriksaan unit usaha pembudidayaan ikan dikatakan taat.....	27
Tabel 9. Capaian Presentase Terselenggaranya pemantauan SDKP TW I Tahun 2020.	28
Tabel 10. Capaian IKU pada SK-5 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP”	31
Tabel 11. Lokasi dan ukuran serta kondisi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang siap operasi.	32
Tabel 12. Lokasi dan ukuran serta kondisi speed boat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang siap operasi.....	33
Tabel 13. Capaian IKU pada SK-6 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP”	33
Tabel 14. kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas.....	34
Tabel 15. kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat pengawas..	35
Tabel 16. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	36
Tabel 17. Capaian IKU pada SK-7 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan”	39
Tabel 18. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan periode Januari – Maret 2020	46

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan	4
Gambar 2. Peta Sasaran Strategis Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2020	10
Gambar 3. Cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas	29
Gambar 4. Capaian IKU unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan	42
Gambar 5. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2020 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan - kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawas SDKP Belawan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "*good governance*".

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2020 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan

pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap bulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

c. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Belawan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi,serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Subseksi Sarana dan Prasarana Pengawasan, dan Kepala Subseksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, Jabatan Fungsional dan Satuan Pengawasan dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

a) Kepala Stasiun :

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Urusan Tata Usaha:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c) Kepala Subseksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran:

Melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

d) Kepala Subseksi Sarana dan Prasarana Pengawasan:

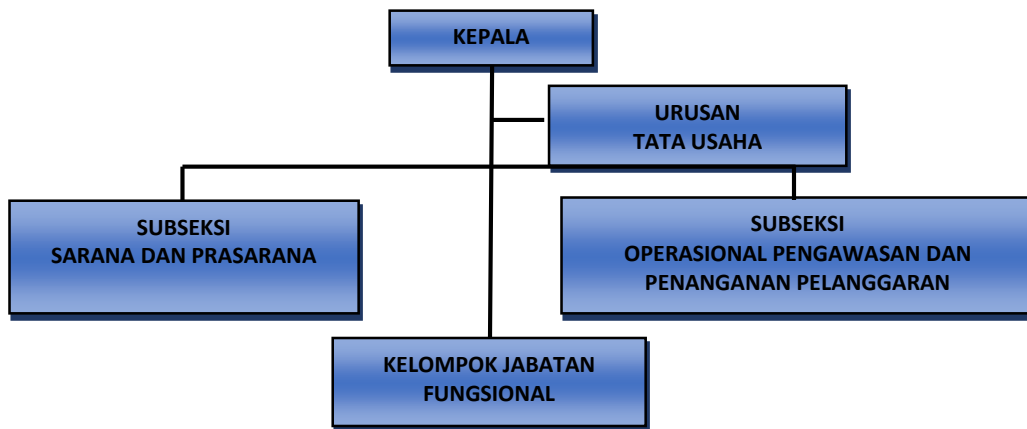
Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

e) Kelompok Jabatan Fungsional:

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

f) Satuan Pengawasan SDKP:

Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan diwilayah kerja masing - masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah dibentuk Satuan Pengawasan SDKP dan Wilker dibawah koordinasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meliputi 3 (Tiga) Satuan Pengawasan (Satwas) sebagai mana Struktur Organisasi pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan

D. Isu Aktual

Isu aktual yang di hadapi Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Masih dijumpai kegiatan penangkapan yang tidak ramah lingkungan atau Alat Tangkap Terlarang seperti penggunaan Trawl;
2. Masih terjadi konflik antar nelayan berhubungan dengan alat tangkap dan daerah penangkapan;
3. Terjadinya degradasi lingkungan pesisir (mangrove, terumbu karang, lamun) akibat aktivitas manusia (*anthropogenic activities*).
4. Tidak optimalnya hari operasi speedboat disebabkan oleh kerusakan mesin speedboat Napoleon.
5. Kurangnya armada speedboat untuk patroli disebabkan pada tahun 2019, 1 Unit Speedboat Dolphin 005 telah di lelang.
6. Masih ditemukan kapal kapal perikanan ukuran > 30 GT yang terpantau / terdapat indikasi pelanggaran menangkap ikan di luar daerah penangkapan ikan;
7. Pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan (oleh industry unit pengolahan ikan).

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perjanjian Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2020.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020; ⁽²⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 dan ⁽³⁾ Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2020.

A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 5 (lima) arah kebijakan utama tahun 2020-2024, yaitu:

- A. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan.
- B. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
- C. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.
- D. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
- E. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

B. Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2015-2019. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya)

- b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
- a. Operasi bersama pengawasan di laut
 - b. Pertukaran data
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
- a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*).
 - d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”

- f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

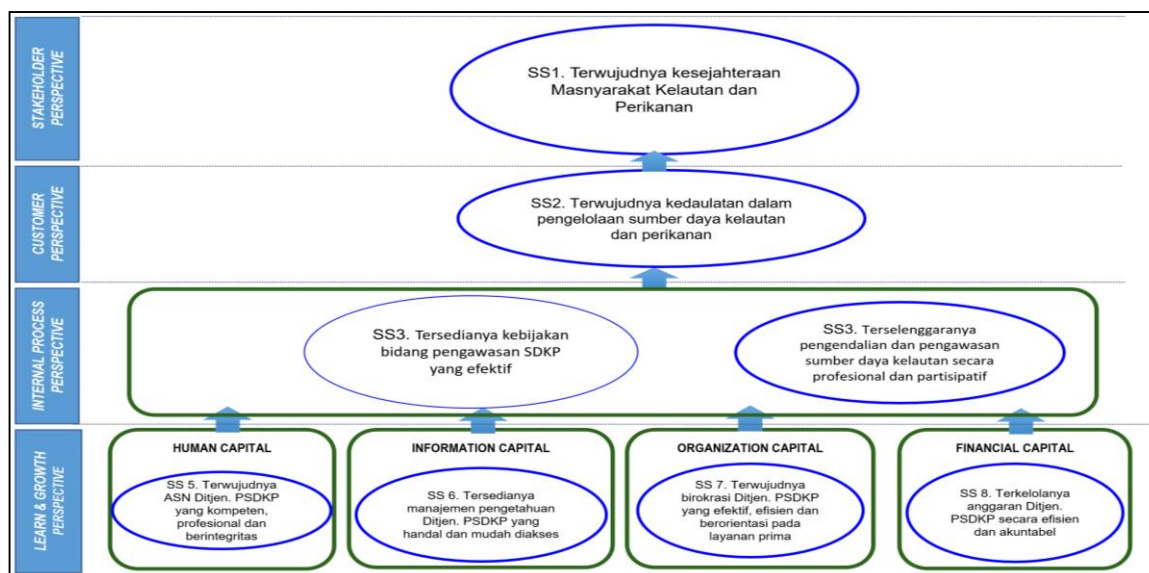
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, ⁽⁴⁾ sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Stasiun PSDKP Belawan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Belawan menggunakan 4 (empat) perspektif dalam BSC, yaitu: *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Dalam penggunaannya, Stasiun PSDKP Belawan hanya menggunakan 3 (tiga) perspektif BSC yaitu *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective* sedangkan untuk *Stakeholders Perspective* dikarenakan Stasiun PSDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai unit kerja pendukung yang mengacu pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai unit kerja utama.

Sasaran Strategis hasil implementasi BSC Tahun 2020 dipetakan dalam Peta Sasaran Strategis pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Peta Sasaran Strategis Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2020

Stakeholders perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholders*. *Customers Perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal Process Perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada *stakeholder* dan *customer*. Sedangkan *Learning and Growth Perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang dihasilkan. Pada Triwulan II Tahun 2020 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan telah mengalami revisi, dimana hal ini dilakukan karena adanya pandemi virus Covid – 19 yang melanda dunia sehingga sebagian anggaran untuk kegiatan pengawasan di alihkan untuk penanganan virus Covid - 19 tersebut.

Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS) ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Sebelum Revisi	Target Setelah Revisi
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	70	70
2.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan [pelaku usaha]	16	16

3.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	3. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100
4.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	1.01	0,6
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	0,07	0,028
		6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70	70
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	7. Jumlah kapal pengawas yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	1	1
		8. Jumlah Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	1	0
		9. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	2	2
		10. Jumlah <i>speedboat</i> yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	2	1
6.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	11. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	300	180
		12. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i> (unit)	80	40
		13. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	150	90
		14. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	60	49
		15. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (orang)	22	22
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	16. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100

		17. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	93
		18. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	93
8.	Tata kelola pemerintahan yang baik	19. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan [Indeks]	72	72
		20. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]	82	82
		21. Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	100
		22. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	1	0
		23. Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	100
		24. Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	100
		25. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan [Indeks]	80	80
		26. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Baik [88]	Baik [88]
		27. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Stasiun PSDKP Belawan dibandingkan Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan TA. 2019 [%]	1	1
		28. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	100
		29. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	100
		30. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	100

D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi BSC “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja BSC berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id) .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2020

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2020

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, pada Tahun 2020 Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (Delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 29 (Dua Puluh Sembilan) IKU. Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2020 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2020



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TARGET TW II	REALISASI TW II	PERSENTASI
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	70	0	0	0
2.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan [pelaku usaha]	16	2	2	100%
3.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	3. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100%
4.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	0,6	0,15	0,17	113%
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed	0,028	0,002	0,002	100%

		Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)				
		6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70	70	70	100%
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	7. Jumlah kapal pengawas yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	1	0	0	0
		8. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	2	2	2	100%
		9. Jumlah <i>speedboat</i> yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	1	1	1	100%
6.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	10. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	180	50	55	110%
		11. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i> (unit)	80	5	6	120%
		12. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	90	26	27,5	105,77%
		13. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	49	2	2	100%
		14. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (orang)	22	0	0	0
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	15. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100%
		16. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk	93	93	93	100%

		lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)				
		17. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	93	93	100%
8.	Tata kelola pemerintahan yang baik	18. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan [Indeks]	72	72	82,3	114%
		19. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]	82	70	100	142%
		20. Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	0	0	0
		21. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	1	0	0	0
		22. Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	0	0	0
		23. Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	0	0	0
		24. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan [Indeks]	80	0	0	0
		25. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Baik [88]	0	0	0
		26. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Stasiun PSDKP Belawan dibandingkan Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan TA. 2019 [%]	1	0	0	0
		27. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	100	100	100%

		28. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	100	100	100%
		29. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	100	100	100%

Penjelasan warna:

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Baik (Skor >=100)
2		Hati-hati (80 <=Skor<100)
3		Buruk (Skor < 80)
4		Belum Ada Skor

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Selama periode Triwulan II Tahun 2020 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat

Pencapaian Sasaran Strategis “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: “Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan”.

Capaian IKU ⁽¹⁾ “Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan target yang ditetapkan sebesar 70 %. Pada TW II Tahun 2020 IKU tersebut belum memiliki capaian, target capaian akan terealisasi pada akhir tahun yaitu 70 %.

Capaian IKU TW II pada tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU TW II pada tahun 2019, karena pada tahun 2019 IKU ini tidak ada. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Adapun dukungan anggaran untuk pencapaian Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020

adalah Rp 0,- (*Belum ada realisasi anggaran*) dengan persentase (0 %) dari anggaran yang dialokasikan 12.600.000,- (*Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

2. Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan

Pencapaian Sasaran Strategis “Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan” diidentifikasi ke dalam IKU yaitu: **“Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”** Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari agregasi 5 (lima) Sub IKU Pengawasan SDK yaitu: ⁽¹⁾ Kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; ⁽²⁾ Jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; ⁽³⁾ Pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; ⁽⁴⁾ Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; ⁽⁵⁾ Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Pada TW II tidak ada di targetkan pelaku usaha yang di periksa kepatuhannya karena adanya pandemi virus Covid -19 dan semua kegiatan pengawasan di tunda sementara, akan tetapi setelah adanya New Normal pada bulan Juni 2020, Stasiun PSDKP mencoba melakukan pengawasan dengan menerapkan protokol kesehatan sehingga capaian pada TW II melebihi dari yang ditargetkan yaitu tercapai sebanyak 2 unit pelaku usaha yang di periksa kepatuhannya atau dengan persentase capaian 100,00%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Pencapaian IKU pelaku usaha yang di periksa kepatuhannya pada TW II tahun 2020 lebih sedikit bila di dibandingkan pada capaian TW II tahun 2019, karena pada TW II tahun 2019 Pelaku usaha yang di periksa sebanyak 12 sementara sampai dengan TW II tahun 2020 pelaku yang di periksa sebanyak 9 pelaku usaha. Capaian IKU ⁽¹⁾ “Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, diperoleh dari hasil pengukuran agresi 5 (lima) Sub-IKU, sebagaimana pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Pengukuran Sub IKU Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI SD TW II	PERSENTASE (%)
1	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	2	3	150%
2	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	2	0	0%
3	Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	4	3	75%
4	Jumlah Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	1	0	0%
5	Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	7	3	42,85%
Total Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan		16	9	56,25%

Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator kinerja Utama pada TW II tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan :
 - a. **Pengawasan pengelolaan mangrove dilakukan di Desa Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara** dengan uraian sebagai berikut :
 - Pemanfaatan kawasan mangrove untuk kegiatan perikanan seperti pembukaan tambak sering kali tidak memperhatikan aspek kelestarian mangrove itu sendiri. Salah satu cara untuk menangani hal tersebut adalah dengan suatu konsep pemanfaatan kawasan mangrove berbasis konservasi yang disebut dengan sistem silvofishery;

- Adapun silvofishery yang diterapkan di desa Sicanang (3°45'78" LU 98°38'42" BT) ini berjalan dengan baik dengan ditokohi oleh Bapak Syahdan dengan didukung oleh bantuan dari pemerintah daerah untuk menjadi wilayah silvofishery percontohan bagi para petambak-petambak lain untuk meningkatkan produktivitas perikanan serta menjaga hutan mangrove agar tetap terjaga kelestariannya. Luasan mangrove silvofishery yang dimiliki oleh Bapak Syahdan seluas kurang lebih 5 Ha;
 - Kondisi mangrove di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Labuhan yang terletak di wilayah silvofishery Sicanang secara umum dalam kondisi baik dan terjaga karena kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan mangrove yang merupakan tempat beruayanya ikan untuk mendapatkan hasil perikanan yang maksimal.
- b. **Pengawasan pengelolaan mangrove dilakukan di Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara** dengan uraian sebagai berikut :
- Menurut informasi dari Kepala Desa Paluh Manan (bpk Syarifuddin) dan Pokmaswas Paluh Manan (bpk Nasrul) bahwa hutang mangrove di Desa Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang sebelum tahun 1998 adalah sekitar 200 Ha. Namun sejak tahun 1998 mulai dibuka lahan tambak di daerah ini yang mengakibatkan hutan mangrove di daerah ini perlahan – lahan menjadi berkurang, diikuti dengan pembukaan perkebunan sawit. Pada saat ini hutan mangrove di daerah ini diperkirakan hanya sekitar 2 Ha;
 - Melihat kondisi ini para nelayan yang ada di Paluh Manan melalui Pokmaswas meminta agar lahan mangrove dikembalikan minimal di wilayah pesisir pantai.
- c. **Pengawasan pengelolaan mangrove dilakukan di Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara** dengan uraian sebagai berikut :
- Kondisi mangrove di Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan yang terletak di Ekowisata Pantai Mangrove Sei Nagalawan secara umum dalam kondisi baik dan terjaga;
 - Diperlukan pengawasan secara lebih intensif dan kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait, sehingga kelestarian dan keseimbangan ekosistem perairan tetap terjaga.

2. Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan :

a. Pantai Cermin Theme Park & Resort Hotel

- Wisata bahari ini berhadapan langsung dengan pemandangan Pantai Cermin, dilengkapi dengan Theme Park yang dikelola dengan baik, menyediakan penginapan, ruang meeting, dan memiliki restoran;
- Tiket masuk ke Theme Park ialah sebesar Rp 35.000 pada hari biasa dan Rp 45.000 pada hari Sabtu dan Minggu;
- Menurut Bapak Samuel Hasibuan, selaku HRD, yang ditemui di lokasi, usaha wisata bahari Pantai Cermin Theme Park & Resort Hotel ini sudah memiliki izin, namun pada saat pengawasan dilakukan, izin sedang tidak ada di lokasi karena dipegang oleh pemilik yang sedang tidak ada di tempat;
- Dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap Pantai Cermin Theme Park & Resort Hotel dapat dilihat bahwa wisata bahari ini memiliki fasilitas yang lengkap dan telah dikelola dengan baik. Tidak ditemukan adanya pelanggaran ataupun indikasi dampak kerusakan lingkungan akibat usaha ini.

b. Pantai Bali Lestari

- Wisata Bahari ini terletak di pinggir Pantai Cermin dengan luasan sebesar kurang lebih 11 Ha. Pantai Bali Lestari berdiri pada tahun 2016 dan dikelola oleh pemilik usaha bernama Bapak Salim;
- Pantai Bali Lestari sudah memiliki dokumen perizinan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat pengawasan dilakukan, dokumen perizinan tidak dapat ditunjukkan karena dokumen dipegang oleh pemilik yang sedang tidak di tempat. Namun kemudian dokumen perizinan dikirimkan melalui *e-mail*. Adapun dokumen perizinan yang dimiliki oleh Pantai Bali Lestari ialah sebagai berikut:
 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 8120110261482 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Pelenggara OSS pada tanggal 18 Desember 2018;
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Pelenggara OSS pada tanggal 18 Desember 2018; dan
 3. Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Pelenggara OSS pada tanggal 18 Desember 2018.

c. Pantai Jono

- Pantai ini berada di Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara;
 - Menurut Kabid Pariwisata Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Parawisata bahwa pengelolaan wisata bahari di Kabupaten Batubara sudah dilakukan namun belum optimal dan belum mendapat dukungan penuh dari semua pengelola daerah wisata. Saat ini sedang disiapkan rancangan Perda untuk memaksimalkan pengelolaan wisata di Kabupaten Batubara;
 - Pantai ini sudah memiliki izin lokasi dan telah mendaftarkan kegiatan berusahanya dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120201982453 pada tanggal 25 September 2018;
 - Wisata Koperasi masyarakat Pantai Jono dapat dikategorikan sebagai wisata yang ramah lingkungan.
3. Pelaku usaha usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu 3 Pelaku Usaha. Adapun pelaku usaha tersebut adalah:
- a. PT. Bahari Makmur Sejati**
 - Perusahaan ini merupakan perusahaan pengolahan produk perikanan dengan komoditas yang dihasilkan yaitu berupa udang beku jenis vannamei;
 - Air yang digunakan oleh PT Bahari Makmur Sejati untuk keperluan produksinya berasal dari sumur bor. Penanganan limbah di PT Bahari Makmur Sejati dilakukan dengan melakukan pengendapan terlebih dahulu, kemudian penanganan limbah lebih lanjut dilakukan dengan sistem IPAL terpadu di gedung pengolahan limbah KIM. Limbah cair hasil produksi dialirkan dengan menggunakan pipa langsung ke KIM. Limbah cair ini berasal dari air yang digunakan pada saat kegiatan pembilasan dan pencucian bahan baku, pembersihan lantai dan juga peralatan kerja.
 - b. PT. Medan Tropical Canning & Frozen Industries**
 - Perusahaan ini merupakan perusahaan pengolahan produk perikanan dengan komoditas yang dihasilkan yaitu berupa ikan patin, makarel, udang, kepiting, tuna, cumi-cumi, dan kerang;
 - Air yang digunakan oleh PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries untuk keperluan produksinya berasal dari air PAM. Penanganan limbah di PT Medan

Tropical Canning & Frozen Industries dilakukan dengan melakukan pengendapan di dalam bak berukuran 3x5x2 m³. Setelah proses pengendapan, limbah dialirkan melalui pipa yang dialirkan ke gorong-gorong khusus ke gedung pengolahan limbah KIM untuk diproses lebih lanjut. Limbah cair ini berasal dari air yang digunakan pada saat kegiatan pembilasan dan pencucian bahan baku, pembersihan lantai dan juga peralatan kerja. PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries memiliki dua saluran pembuangan, yaitu saluran pembuangan khusus produksi kaleng dan saluran pembuangan khusus produksi beku. Tiap bulannya PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries menghasilkan kurang lebih sekitar 5.100 m³ limbah cair.

c. PT. Seafood Sumatera Perkasa

- Perusahaan ini berada di Jl. Titi Pahlawan No. 38 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan, Sumatera Utara;
- Perusahaan ini memiliki dokumen berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor 8120002962402 yang ditetapkan tanggal 20 September 2018 oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Lembaga Pengelola Dan Penyelenggara OSS ini juga mengeluarkan Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan tanggal 20 September 2018 dengan bidang usaha pengolahan hasil perikanan;
- Perusahaan ini telah mempunyaidokumen AMDAL/UKL-UPL dengan No: 660/0573/BLH/II/2014 yang di tetapkan tanggal 18 Februari 2014 oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Medan dan telah memiliki izinlingkunganyang di keluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 18 Februari 2014;
- PT. Seafood Sumatera Perkasa mempunyai IPAL, dimana perusahaan secara mandiri membuat IPAL yang dibuat dengan mekanisme berupa penyaringan dan pengendapan.

Untuk mencapai sasaran strategis kegiatan – 2 ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 196.750.000 (*Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan sampai dengan 30 Juni 2020 telah terealisasi sebesar Rp.18.262.441 (*Delapan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*) atau 9,28%.

3. Sasaran Kegiatan 3 : Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan” diidentifikasi ke dalam IKU yaitu **”Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”** Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari persentase capaian jumlah pelaku usaha bidang perikanan yang terdiri dari agresi 4 (empat) Sub IKU Pengawasan SDP yaitu: ⁽¹⁾ Kapal perikanan yang patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan; ⁽²⁾ Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan; ⁽³⁾ Unit Usaha Budidaya Ikan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan; ⁽⁴⁾ Usaha distribusi perikanan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan; dengan hasil capaian 100% .

Pada TW II tahun 2020 ditargetkan sebanyak 100 % pelaku usaha perikanan yang di periksa kepatuhannya, capaian pada TW II tercapai sesuai dengan yang ditargetkan yaitu tercapai sebanyak 100% unit pelaku usaha perikanan yang di periksa kepatuhannya atau dengan persentase capaian 100 %. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Capaian IKU TW II pada tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU TW II pada tahun 2019, karena pada tahun 2019 IKU ini tidak ada. Capaian IKU “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, diperoleh dari hasil pengukuran agresi 4 (empat) Sub-IKU, sebagaimana pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TARGET TW II	REALISASI SD TW II	%
1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan lingkup lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	100%
2	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	100%

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TARGET TW II	REALISASI SD TW II	%
3	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	100%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha distribusi hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	100%
Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan		100	100	100	100%

Untuk Pembahasan capaian kinerja masing-masing sub IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, sebagai berikut:

a. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan lingkup lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Nilai capaian Sub-IKU tersebut diperoleh dari jumlah kapal yang diperiksa kepatuhannya yang laik operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Kapal yang diperiksa kepatuhannya yang sesuai dengan IKU “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

Pencapaian ini diupayakan melalui kegiatan: Monitoring dan evaluasi ketaatan kapal melalui Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan yang beroperasi di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan, yang menangkap ikan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Berdasarkan hasil analisis selama bulan Januari sampai dengan Maret 2020. Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan lingkup lingkup Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 5 Berikut:

Tabel 5. Tahapan pemeriksaan kapal perikanan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,25	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,25	Berita Acara Hasil
3	Pemeriksaan Kelayakan teknis	0,25	Pemeriksaan
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,25	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

- b. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala besar dan skala kecil. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat *Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP)* serta Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate (HC)* bagi usaha yang pengekspor produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambahan Berbahaya (BTB). Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 6 Berikut:

Tabel 6. Tahapan pemeriksaan unit usaha pengolahan hasil perikanan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,25	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,25	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan Teknis	0,25	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,25	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

- c. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha distribusi hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Pencapaian tersebut diperoleh dari hasil pengawasan distribusi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan, lingkup wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha distribusi hasil perikanan Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 7 Berikut:

Tabel 7. Tahapan pemeriksaan unit usaha distribusi hasil perikanan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,25	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,25	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan Teknis	0,25	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,25	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pengawasan terhadap usaha budidaya ikan meliputi dokumen perizinan, obat dan pakan ikan yang digunakan. Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha pembudidayaan ikan Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 8 Berikut:

Tabel 8. Tahapan pemeriksaan unit usaha pembudidayaan ikan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,25	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi dan Kelayakan Teknis	0,25	Berita Acara Hasil Pengawasan di Simwaskan
3	Pemeriksaan Kesesuaian Kegiatan Usaha, Sarana dan Prasarana	0,25	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,25	Laporan Hasil Pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Untuk mencapai sasaran kegiatan – 3 ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 501.024.000 (*Lima Ratus Satu Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*) dan sampai dengan 30 Juni 2020 telah terealisasi sebesar Rp.103.049.798 (*Seratus Tiga Juta*

Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau 20,57%.

4. Sasaran Kegiatan 4 : Terselenggaranya Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 4 “Terselenggaranya pemantauan SDKP” diidentifikasi ke dalam 3 (tiga) IKU, yaitu: (1) Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (2) Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Ilegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (3) Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP. Adapun capaian dari Sasaran Kegiatan - 4 dapat dilihat pada table 9 sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI SD TW II	PERSENTASE (%)
1	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan	0,60	0,53	88,33%
2	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Ilegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan	0,028	0,0073	26,07%
3	Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP	70	70	100%

Tabel 9. Capaian Presentase Terselenggaranya pemantauan SDKP TW II Tahun 2020

Penjelasan masing-masing IKU pada Sasaran Kegiatan - 4 Terselenggaranya Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

(1) IKU Presentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IKU Presentase Cakupan WPP-NRI Yang Terawasi Dari *IUU Fishing* dan Kegiatan Yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan akan memberikan kontribusi terhadap capaian IKU Tingkat Keberhasilan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan secara nasional, yang ditargetkan oleh Direktorat Pemantauan Operasional Armada (POA) sebesar 2,24 %. IKU tersebut merupakan

indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Pengukuran kinerja diperoleh dari perhitungan Cakupan Laut melalui operasi Kapal Pengawas Perikanan Hiu 01 dan Hiu 08 Pada periode Tahun 2020, Operasi Kapal pengawas dilaut telah dilaksanakan dengan jumlah hari operasi rata-rata sebanyak 72 hari operasi dengan dukungan Kapal pengawas sebanyak 2 Unit Kapal, yaitu KP. Hiu 01 dan KP. Hiu 08.

Capaian IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2019, karena IKU ini adalah IKU baru dan tidak ada pada tahun 2019. Berdasarkan hari operasi Pada Triwulan II tahun 2020 diperoleh cakupan area yang mampu diawasi oleh kapal pengawas seluas 10.131 nm² (nautica mile) atau sebesar 0,53%. Perhitungan tersebut dapat di lihat pada Gambar 3 sebagai berikut:

No	UPT PSDKP	No	Kapal Pengawas	Kelas	Total Hari	Jam Operasi (jam)	Kecepatan Dinas (NM/jam)	Jangkauan Efektif Radar (NM)	Cakupan Teoritis (CT) NM ²	Area Operasi Utama	Faktor Koreksi WPP (F _{wpp})	Faktor Koreksi Kapal (F _{kp})	Cakupan Aktual (CA) NM ²	%Cakupan Aktual
7	Stasiun PSDKP Belawan	11	Hiu 01	D	73	750,15	15	12	135.027	571	0,20	0,20	5.401	0,28
		12	Hiu 08	D	65	658.883	15	12	118.259	571	0,20	0,20	4.730	0,25
<i>Total</i>									253.286				10.131	0,53

Gambar 3. Cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas

(2) Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IKU Presentase Cakupan WPP-NRI Yang Terawasi Dari *IUU Fishing* dan Kegiatan Yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan akan memberikan kontribusi terhadap capaian IKU Tingkat Keberhasilan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan secara nasional, yang ditargetkan oleh Direktorat Pemantauan Operasional Armada (POA) sebesar 0,26 %. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

IKU ini tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan capaian pada tahun 2019, karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2020. Pengukuran kinerja diperoleh dari perhitungan Cakupan Laut melalui operasi *Speedboat* pengawasan. Pada

periode Tahun 2020, Operasi *Speedboat* pengawasan dilaut telah dilaksanakan dengan jumlah hari operasi sebanyak 7 hari operasi dengan dukungan *Speedboat* pengawasan sebanyak 1 Unit *Speedboat*. Berdasarkan hari operasi tersebut Pada Triwulan II tahun 2020 diperoleh cakupan area yang mampu diawasi oleh *Speedboat* sebesar 0,002% dari Target TW II tahun 2020 yaitu sebesar 0,002% dengan presentase capaian 100%.

(3) IKU Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP

IKU Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP Stasiun PSDKP Belawan merupakan IKU baru dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 70 %, pada TW II tahun 2020 sudah tercapai 70%.

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada TW II tahun 2019, karena IKU ini baru ada pada tahun 2020.

5. Sasaran Kegiatan 5 : Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP

Dalam rangka pencapaian SK-5 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP” Stasiun PSDKP Belawan pada TW II ini mengalami revisi dari yang sebelumnya 4 (empat) IKU menjadi 3 (tiga) IKU, yaitu: (1) Jumlah kapal pengawas yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit); (2) Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit); (3) Jumlah *speedboat* yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit). Adapun IKU “Jumlah bangunan/pos pengawasan yang di bangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan” pada TW II ini di hapuskan karena anggaran IKU tersebut di alihkan untuk penanganan Covid-19. Adapun Capaian IKU pada SK-5 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP” dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian IKU pada SK-5 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	REALISASI SD TW II	PERSENTASE (%)
Jumlah kapal pengawas yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	1 unit	0 unit	0
Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	2 unit	2 unit	100%
Jumlah <i>speedboat</i> yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	1 unit	1 unit	100%

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SK-5 sebagai berikut:

(1) IKU Jumlah kapal pengawas yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)

Terselenggaranya pembangunan kapal pengawas yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan ditargetkan sebanyak 1 (satu) unit yang merupakan wujud keseriusan KKP khususnya DJ-PSDKP dalam memerangi ancaman *IUU Fishing*. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang masuk dalam Prioritas Nasional, untuk mendukung pencapaian IKU kapal pengawas yang dibangun pada TW II ini di anggarkan Biaya sebesar Rp. 18.821.112.000 (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah). Jumlah anggaran tersebut telah mengalami revisi akibat terjadinya wabah virus Covid-19 dimana anggaran sebelumnya sebesar Rp.43.396.860.000,- (Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Pada Periode TW II tahun 2020 IKU kapal pengawas yang dibangun belum ada capaian, IKU akan tercapai 1 (unit) Unit speedboat pengawas yang dibangun pada TW IV Tahun 2020.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW II tahun 2019, karena ini merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020.

(2) IKU Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IKU kapal pengawas yang siap operasi pada Stasiun PSDKP Belawan di dukung oleh 2 (dua) unit Kapal Pengawas yaitu HIU 01 dan HIU 08. Kegiatan utama IKU ini merupakan kesiapan kapal pengawas yang siap melakukan operasi pengawasan, diantaranya dengan melakukan pengecekan mesin, perawatan kapal pengawas dan serta pemeliharaan kapal pengawas. Pada Triwulan II tahun 2020 jumlah kapal Pengawas yang siap Operasi sebanyak 2 (dua) unit kapal pengawas.

Capaian IKU ini pada TW II tahun 2020 sama dengan capaian pada TW II tahun 2019. Data dukung capaian IKU ini tercantum dalam Tabel 11 berikut:

Tabel 11. Lokasi dan ukuran serta kondisi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang siap operasi.

Keterangan	Jumlah Kapal	Target Triwulan II	Capaian
<i>Jumlah Kapal Pengawas yang siap operasi</i>			
KP. Hiu 01	1	1	1
KP. Hiu 08	1	1	1
TOTAL	2 Unit	2 Unit	2 Unit

(3) IKU Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IKU *speed boat pengawas* yang siap operasi pada Stasiun PSDKP Belawan di dukung oleh 1 (satu) unit *speed boat pengawas*. Kegiatan utama IKU ini merupakan kesiapan speedboat pengawas yang siap melakukan operasi pengawasan, diantaranya dengan melakukan pengecekan mesin, perawatan *speed boat pengawas* disertai pemeliharaan *speed boat pengawas*. Pada Triwulan II jumlah *Speedboat* yang siap operasi sebanyak 1 (satu) unit dan target IKU ini telah mengalami revisi dari yang sebelumnya *Speedboat* yang siap operasi sebanyak 2 (dua) unit. Revisi target ini di lakukan karena biaya untuk perbaikan Napoleon 028 belum tersedia.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW II tahun 2019, karena ini merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020. Data dukung capaian IKU ini tercantum dalam Tabel 12 berikut:

Tabel 12. Lokasi dan ukuran serta kondisi *speed boat pengawas* lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang siap operasi.

Keterangan	Jumlah Kapal	T arget Triwulan II	Capaian
<i>Jumlah speed boat pengawas yang siap operasi</i>			
Dolphin 014 (Satwas SDKP Tanjung Balai Asahan)	1	1	1
TOTAL	1 Unit	1 Unit	1 Unit

6. Sasaran Kegiatan 6 : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP

Dalam rangka pencapaian SK-6 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 5 (lima) IKU, yaitu: (1) Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas; (2) Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan *speedboat*; (3) Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (4) Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (5) Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Adapun Capaian IKU pada SK-6 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP” dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Capaian IKU pada SK-6 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	REALISASI SD TW II	PERSENTASE (%)
Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	180 unit	153 unit	85%
Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i> (unit)	40 unit	26 unit	65%
Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	90 hari	72 hari	82%

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	REALISASI SD TW II	PERSENTASE (%)
Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	49 hari	7 hari	14,29%
Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (orang)	22 orang	0 orang	0%

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SK-6 sebagai berikut:

1. IKU "Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas "

Untuk mendukung tercapainya IKU "Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas" didukung oleh Kapal Pengawas Hiu 01 dan Hiu 08 yang siap operasi, di tahun 2020 ditargetkan sebanyak 180 unit kapal perikanan yang di periksa dilaut. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Pada Periode TW II telah tercapai 55 unit kapal perikanan yang diperiksa dilaut , melebihi dari yang ditargetkan pada TW II sebanyak 50 Unit kapal Perikanan yang di periksa.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW II tahun 2019, karena ini merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020. Capaian IKU jumlah kapal yang diperiksa dilaut menggunakan kapal pengawas dapat di lihat pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14. kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	TARGET TW II	CAPAIAN TW II	CAPAIAN S/D TW II
Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	180 unit	50 unit	55 unit	153

2. IKU “Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat “

Untuk mendukung tercapainya IKU “Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat” didukung oleh speedboat yang siap operasi sebanyak 2 (dua) unit, di tahun 2020 ditargetkan sebanyak 80 unit kapal perikanan yang di periksa dilaut. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Pada Periode TW I telah tercapai 20 unit kapal perikanan yang diperiksa dilaut , sama dari yang ditargetkan pada TW I sebanyak 20 Unit kapal Perikanan yang di periksa.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW I tahun 2019, karena ini merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020 Capaian IKU jumlah kapal yang diperiksa dilaut menggunakan kapal pengawas dapat di lihat pada Tabel 15 berikut:

Tabel 15. kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat pengawas

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	TARGET TW II	CAPAIAN TW II	CAPAIAN S/D TW II
Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	49 unit	5 unit	6 unit	26

3. IKU “Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

Kegiatan operasional pengawasan kegiatan *IUU Fishing* dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP-NRI Wilayah Barat didukung oleh 2 (dua) unit Kapal Pengawas yaitu KP. Hiu 01 dan KP. Hiu 08. Capaian IKU Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Tahun 2020 di targetkan sebanyak 90 (sembilan puluh) hari operasi. Pada TW II telah tercapai rata-rata 72 hari Operasi menggunakan Kapal Pengawas Hiu 01 dan Hiu 08 , melebihi dari target yang telah di tetapkan pada TW II Tahun 2020 yaitu rata-rata 65 Hari Operasi di lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Capaian IKU jumlah hari operasi rata-rata kapal pengawas pada TW II 2020 tercapai sebanyak 72 hari operasi, dibandingkan dengan capaian pada TW II tahun 2019 IKU ini mengalami peningkatan rata-rata sebanyak 22,5 hari operasi, karena capaian hari operasi kapal pengawas pada TW II 2019 rata-rata sebanyak 49,5 hari operasi.

Adapun rincian capaian hari operasi rata-rata kapal pengawas pada tahun 2020, dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	TARGET TW II	CAPAIAN TW II	CAPAIAN S/D TW II
Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	90 Hari Operasi	26 Hari	27,5 Hari	72 Hari

Adapun realisasi anggaran untuk pencapaian IKU Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Hari Operasi) sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 adalah 3.788.701.254,- (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*) dengan persentase (48,90%) dari anggaran yang dialokasikan Rp.7.747.440.000,- (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*). Anggaran ini telah mengalami revisi karena adanya wabah Covid-19, dimana sebagian anggaran tersebut di gunakan untuk penanggulangan wabah Covid-19. Adapun anggaran untuk operasional hari operasi kapal pengawas sebelum di revisi yaitu sebesar Rp 12.355.480.000,- (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

4. IKU “Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)”

Kegiatan utama IKU ini merupakan pengawasan kegiatan *IUU Fishing* dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP-NRI dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat Dolphin 014 dengan target hari Operasi *Speed Boat* pada tahun 2020 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Hari Operasi. Pada TW II telah tercapai 7 hari Operasi menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan, sesuai dari target yang telah di tetapkan pada TW II Tahun 2020 yaitu 7 Hari Operasi di lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Capaian IKU jumlah hari operasi *Speedboat* pada TW II 2020 tercapai sebanyak 7 hari operasi, dibandingkan dengan capaian pada TW II tahun 2019 dengan menggunakan Dolphin 014, IKU ini mengalami penurunan sebanyak 2 hari operasi, karena capaian hari operasi

Speedboat pada TW II 2019 dengan menggunakan speedboat Dolphin 014 sebanyak 9 hari operasi.

Kegiatan utama yang dilaksanakan Tahun 2020 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat sebagai berikut:

- Speed Boat Dolphin 014 Ukuran (8 Meter) Kelas F , Lokasi Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan capaian hari operasi pada TW II tahun 2020 yaitu sebanyak 7 hari operasi dengan hasil pemeriksaan terhadap kapal ikan dilaut sebanyak 26 unit kapal.

Untuk mendukung capaian IKU “Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat UPT Stasiun PSDKP Belawan” dialokasikan anggaran sebesar Rp.244.853.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*) sampai dengan 30 Juni 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 24.197.750,- (*Dua Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) atau 9,88%

Anggaran ini telah mengalami revisi dari sebelumnya sebesar Rp.826.620.000,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) menjadi Rp.244.853.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*). Revisi ini dilakukan untuk mengalokasikan dana dalam penanganan wabah Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

5. IKU “Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

Awak kapal pengawas merupakan ujung tombak sebagai penegak hukum dibidang perikanan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Dalam menjalankan tugasnya guna mendukung kegiatan operasi pengawasan SDKP awak kapal pengawas harus selalu siap dalam segala hal baik mental, fisik untuk mengawaki 1 (satu) unit kapal pengawas di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Dilihat dari hal tersebut perlu adanya upaya untuk mewujudkan awak kapal pengawas yang sehat, terampil, professional dan siap dalam melaksanakan tugas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, maka perlu adanya pemeriksaan kesehatan

(*medical check up*) secara berkala bagi setiap awak Kapal Pengawas, untuk mengetahui kondisi kesehatan dan kesiapan fisik bagi awak kapal pengawas. Dengan kondisi kesehatan awak kapal pengawas yang sehat maka dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dilaut dengan baik.

Untuk mendukung IKU tersebut pada tahun 2020 telah ditargetkan oleh Direktorat Pengoperasian Operasional Armada (POA) sebanyak 22 Orang Awak kapal Pengawas Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Pada TW II belum ada Awak Kapal yang melakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*).

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW II tahun 2019, karena ini merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020

Untuk mendukung capaian IKU “Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dialokasikan anggaran sebesar Rp.32.400.000,- (*Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) sampai dengan 30 Juni 2020 anggaran tersebut belum ada terserap/terrealisasi.

7. Sasaran Kegiatan 7 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka pencapaian SK-7 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 3 (tiga) IKU, yaitu: (1) Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (2) Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (3) Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan. . Adapun Capaian IKU pada SK-7 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan pada Tabel 17.

Tabel 17. Capaian IKU pada SK-7 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2020	TARGET TW II	CAPAIAN
Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100%	100	100
Persentase Jumlah kapal perikanan yang diperiksa Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93%	93	93
Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93%	93	93

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SK-7 sebagai berikut:

1. IKU Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%).

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 untuk IKU Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu 100%. Pada periode TW II capaian IKU ini telah terealisasi 100% dari 4 tindak pidana perikanan yang ditangani.

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada TW II tahun 2019, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020.

2. IKU Jumlah kapal perikanan yang diperiksa Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%).

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 untuk IKU Jumlah kapal perikanan yang diperiksa Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) yaitu 93%. Pada periode TW II capaian IKU Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Belawan terealisasi 93% dari 4 tindak pidana perikanan yang ditangani pada TW II tersebut.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW II tahun 2019, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020.

3. IKU Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

Target yang di tetapkan pada tahun 2020 untuk IKU Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) yaitu 93%. Pada periode TW II capaian IKU Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan terealisasi 93% dari 4 tindak pidana perikanan yang di tangani pada TW II tersebut.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW II tahun 2019, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020.

Untuk mendukung capaian SK-7 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan” dialokasikan anggaran sebesar Rp.384.000.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah*) sampai dengan 30 Juni 2020 telah terealisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau 8,8 %.

8. Sasaran Kegiatan 8 : Tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam rangka pencapaian SK-8 “Tata kelola pemerintahan yang baik” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 11 (sebelas) IKU, yaitu: (1) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (2) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup; (3) Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (4) Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (5) Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (6) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan; (7) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (8) Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Stasiun PSDKP Belawan dibandingkan Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan TA. 2019; (9) Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (10) Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan dan (11) Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SK-8 sebagai berikut:

(1) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

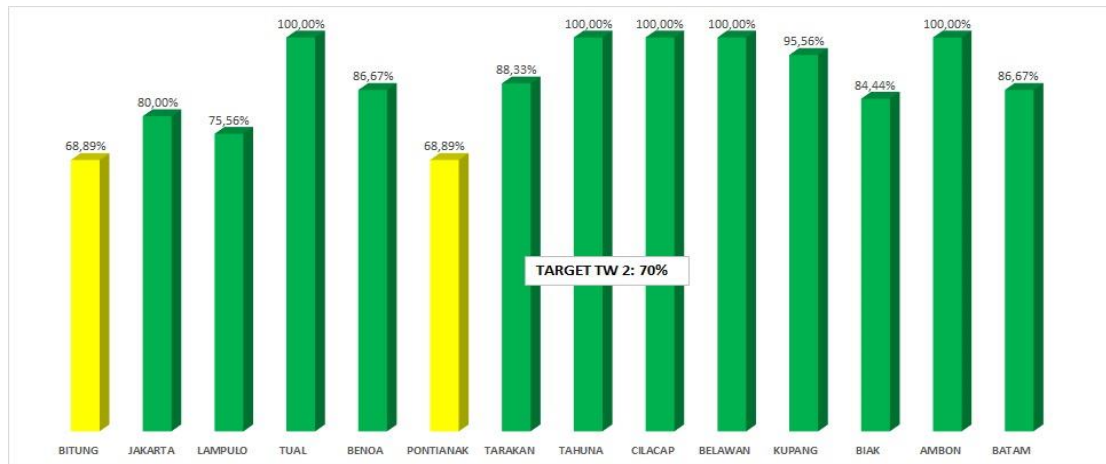
IKU yang digunakan adalah “indeks kompetensi dan integritas Stasiun PSDKP Belawan” dimana capaian yang diperoleh melalui metode adopsi langsung dari atasan dengan target telah diseragamkan bagi seluruh Eselon I lingkup KKP yaitu sebesar 72. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu: 1) hasil *asesment* eselon IV lingkup Ditjen. PSDKP; 2) tingkat kehadiran pegawai melalui absensi *finger print*; 3) Capaian SKP; dan 4) LHKPN dan LHKASN. Pada Triwulan II Tahun 2020 capaian IKU indeks kompetensi dan integritas Stasiun PSDKP Belawan belum ada Skor dari target IKU yang ditetapkan yaitu 72, perhitungan skor dinilai pada akhir tahun 2020.

(2) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi Bitrix24.com dengan target 82 % satu tahun. Perhitungan capaian Presentase unit kerja Stasiun PSDKP Belawan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Triwulan II tahun 2020 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian pada TW II sebesar 100 % melebihi dari target yang di tetapkan pada TW II yaitu sebesar 70%. Data dan informasi yang disajikan dalam Bitrix24.com Stasiun PSDKP Belawan diantaranya berupa : Berita Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Profil Stasiun PSDKP Belawan serta Satuan Pengawas (Satwas) SDKP dan Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Belawan, Update Data Penerbitan SLO.

Bila dibandingkan dengan Capaian IKU pada TW II tahun 2019, IKU ini mengalami peningkatan sebesar 27,5%, karena Capaian Iku pada TW II 2020 tercapai sebesar 100% sementara pada TW II tahun 2019 tercapai 72,50 %. Capaian IKU unit kerja

yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat dilihat pada gambar 4 berikut



Gambar 4. Capaian IKU unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan

(3) Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pengukuran penerapan Reformasi Birokrasi (RB) menggunakan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan *quality assurance* oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit Eselon I KKP termasuk Ditjen. PSDKP. *Quality assurance* yang digunakan adalah dengan mengukur delapan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor: 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Nilai Kinerja RB lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Triwulan II Tahun 2020 belum ada capaian, Capaian IKU akan terealisasi pada TW IV dengan cara mengadopsi langsung dari Eselon I yaitu Direktorat Jenderal PSDKP yaitu 100 %.

(4) Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Persentase pemenuhan dokumen SPIP dapat dijadikan media atau alat evaluasi sekaligus perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian intern yang diadopsi di masing-masing unit kerja. Persentase pemenuhan dokumen SPIP Stasiun PSDKP Belawan periode Triwulan II Tahun 2020 belum ada skor dan perhitungannya akan tercapai pada akhir tahun 2020 dengan mengadopsi langsung dari Eselon I DJ-PSDKP.

(5) Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pemenuhan Dokumen AKIP Stasiun Pengawasan SDKP Belawan pada Triwulan II Tahun 2020 belum ada capaian, capaiannya akan terealisasi pada akhir TW IV 2020 dengan mengadopsi langsung dari Eselon I DJ-PSDKP yaitu 100 %.

(6) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan

Pemenuhan Dokumen Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan pada Triwulan II Tahun 2020 belum ada capaian, capaiannya akan terealisasi pada akhir TW IV 2020 yaitu dengan nilai Indeks 80. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW II tahun 2019, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020.

(7) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Stasiun PSDKP Belawan

▪ **Nilai Kinerja Anggaran**

Pengukuran Indikator Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan meliputi 13 (dua belas) komponen capaian yaitu sebagai berikut: Pengelolaan Uang Persediaan, Data Kontrak, kesalahan SPM, Retur SP2D, Hal III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian tagihan, Rekon LPJ, renkas, Realisasi, Pagu minus dan Dispensasi SPM. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW II Tahun 2020 sebesar 75,92%. Target nilai IKPA yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu dengan nilai BAIK (88). Capaian tersebut dapat dilihat pada gambar 5 berikut:



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Renikas	Kesalahan SPM			
1	123	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	Nilai	100.00	32.74	99.99	83.00	100.00	100.00	0.00	83.88	100.00	0	100.00	100.00	85.00	75.92	85%	N/A
				Bobot	5	5	5	15	8	5	0	15	12	0	5	5	5			
				Nilai Akhir	5.00	1.64	5.00	12.45	8.00	5.00	0.00	12.58	12.00	0	5.00	4.25				
Nilai Aspek					77.58			70.75				70.97				92.50				

Disclaimer:

1) Sehubungan dengan Surat Ditetapkan Perundang-undangan Nomor S-258/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020, maka penilaian IKPA untuk level Satker, Eselon I, K/L, KPPN, dan Kamwil tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan.

2) Nilai per indikator yang masih muncul pada halaman ini dapat digunakan untuk keperluan manajerial, namun tidak digunakan sebagai basis penilaian kinerja.

Gambar 5. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

(8) Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Stasiun PSDKP Belawan dibandingkan Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan TA. 2019.

Setiap Kementerian/Lembaga baik ditingkat pusat maupun daerah, wajib mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya dengan menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Untuk meyakini keakuratan data yang disajikan dalam LK tersebut, maka secara berjenjang wajib melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan. Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama, dimana hasil rekonsiliasi ini nantinya akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tercapainya target ketaatan Tingkat kepatuhan mencapai 100%. Hal ini didukung oleh konsistensi penerapan berbagai aturan dalam pelaksanaan kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Capaian Triwulan II TA. 2020 terhadap persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Stasiun PSDKP Belawan TA.2019 yaitu belum ada skor, capaian tersebut akan di nilai pada akhir tahun 2020 dengan mengadopsi langsung dari Eselon I DJ-PSDKP.

(9) Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Pemenuhan Dokumen layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan II Tahun 2020 belum ada capaian, capaiannya akan terealisasi pada akhir TW IV 2020 yaitu dengan presentase sebesar 100 %. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Capaian TW II tahun 2019 untuk IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU TW II pada tahun 2020, karena pada tahun 2019 IKU ini belum ada.

(10) Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pemenuhan Dokumen layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan II Tahun 2020 belum ada capaian, capaiannya akan terealisasi pada akhir TW IV 2020 yaitu dengan persentase sebesar 100 %. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Capaian TW II tahun 2019 untuk IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU TW II pada tahun 2020, karena pada tahun 2019 IKU ini belum ada.

(11) Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pemenuhan Dokumen layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan II Tahun 2020 belum ada capaian, capaiannya akan terealisasi pada akhir TW IV 2020 yaitu dengan persentase sebesar 100 %. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Capaian TW II tahun 2019 untuk IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU TW II pada tahun 2020, karena pada tahun 2019 IKU ini belum ada.

Akuntabilitas Keuangan

Pada Triwulan II Tahun 2020 Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Belawan mengalami revisi akibat adanya wabah Covid-19, dimana sebagian anggaran dialokasikan untuk penanganan wabah Covid-19 tersebut. Anggaran Stasiun PSDKP Belawan pada Tahun 2020 setelah direvisi menjadi sebesar Rp 45.777.424.000,- (Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dari yang sebelumnya sebesar Rp. 76.652.522.000,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

Realisasi anggaran tahun 2020 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai Triwulan II 2020 sebesar 33,55% atau sebesar Rp 15.358.282.343,- (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dari total anggaran yang di alokasikan yaitu Rp 45.777.424.000,- (Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 18 berikut:

Tabel 18. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan periode Januari – Juni 2020

Kode	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2350	Pemantauan dan Operasi armada	32.785.220.000	10.201.732.470	31,12
2351	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	384.000.000	33.800.000	8,80
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	196.750.000	18.262.441	9,28
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	501.024.000	103.049.798	20,57
2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	11.910.430.000	5.001.437.634	41,99
Jumlah		45.777.424.000	15.358.282.343	33,55

Sumber: Bagian Keuangan Stasiun PSDKP Belawan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2020 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun PSDKP Belawan pada tahun anggaran 2020, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi, Stasiun PSDKP Belawan berlandaskan kepada tujuan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan didalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Belawan (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

B. Saran

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja.
2. Komitmen semua pihak untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU sesuai dengan yang ditetapkan.
3. Mengembangkan dan meningkatkan SDM pengawasan yang kompeten serta sarana dan prasarana pengawasan secara bertahap.
4. Mengoptimalkan pengumpulan data dan informasi potensi pengawasan SDKP, dengan meningkatkan peran Satwas, Wilker lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Rencana tindak lanjut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler.
2. Melakukan Perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mendukung pencapaian IKU.
3. Mengusulkan SDM Pengawas mengikuti diklat dan meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan.
4. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari Satwas lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

LAMPIRAN

1. Lampiran Perjanjian Kinerja



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.direksi.kkp.go.id EMAIL: ditjenpepsi@kp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Fahrutsyah
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tb. Haeru Rahayu
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Mei 2020

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan


Tb. Haeru Rahayu


Andri Fahrutsyah

"Berjaya dengan integritas dan inovasi"

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	70
2.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan [pelaku usaha]	16
3.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	3. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
4.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	0,60
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	0,028
		6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	7. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	2
		8. Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	1
6.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	9. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	180
		10. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat (unit)	20
		11. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	90
		12. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	49
		13. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (orang)	22

Selanjutnya dengan inisiatif dan tindakan

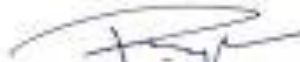
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	14. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		15. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
		16. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
8.	Tata kelola pemerintahan yang baik	17. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan [Indeks]	72
		18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]	82
		19. Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100
		20. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		21. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		22. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		23. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	1
		24. Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100
		25. Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100
		26. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan [Indeks]	80
		27. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Baik [88]
		28. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Stasiun PSDKP Belawan dibandingkan Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan TA. 2019 [%]	1

"Berprestasi dengan integritas dan kualitas"

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemantauan dan Operasi Armada	32.785.220.000
2.	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	384.000.000
3.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	196.750.000
4.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	501.024.000
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	11.910.430.000
Total Anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Belawan		45.777.424.000

Jakarta, 8 Mei 2020

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan



Andri Fehrulayyah

"Berprestasi dengan integritas dan keteladanan"